



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 1/J TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata cara Pemberian Hibah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286);
2. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4343);
3. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4355);
4. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4400);
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 2

Hibah sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah pemberian uang dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

Kriteria pemberian hibah :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. ~

- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah paling sedikit :
1. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Minahasa Utara;
 2. memiliki surat keterangan domisili dari hukum tua/lurah
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya di Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan-perundang-undangan.
- c. Sadan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sadan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sadan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; atau
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal5

Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal6

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima Hibah yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah ;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.,lv

Pasal7

Kepala Oaerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal8

Pemerintah pusat , pemerintah daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan permohonan/usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal yang memuat minimal antara lain:
 1. Tujuan penggunaan dana hibah
 2. Rincian Siaya
 3. Kepengurusan yang jelas
- b. Surat keterangan dari Hukum Tua/Lurah tentang domisili badan dan lembaga serta organisasi yang bersangkutan
- c. Fotocopy KTP pengurus organisasi
- d. Hibah badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Sangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara bahwa organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar minimal 3 (tiga) tahun.
- e. Hibah Rumah Ibadah memiliki Surat Tanda Laper dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal9

Tata cara penganggaran hibah adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon hibah menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- b. Kepala Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan.
- c. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Oaerah melalui TAPD.
- d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat daftar nama penerima serta besaran dana yang akan diberikan.
- e. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA-PPAS.
- f. Anggaran yang dimaksud dalam ayat (4) meliputi anggaran untuk hibah berupa uang.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi dasar penganggaran pada APSD.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APSD dan Peraturan Kepala Oaerah tentang Penjabaran APSD;
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah./v

- (3) Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 12

Mekanisme pencairan dana hibah berupa uang adalah sebagai berikut :

- a). Penerima hibah yang namanya serta besaran uang sudah tercantum dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b). Sekretaris Daerah memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
- c). PPKD memerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;
- d). KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
- e). Penerima hibah menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan.

Pasal 13

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a). laporan penggunaan hibah;
 - b). surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c). bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 16

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan._r..-

Pasal 17

Peraturan Supati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara/v

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : > ,c;,...Mt>C-n. 2018

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Padatanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA** **1**
{ }

— **-d-** _{Lp}

~
JEMMY H. KUHU

Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor: ~

- Tembusan Yth.
1. Wakil Supati Minahasa Utara;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa Utara;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
 5. Kepala Sadan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
 6. Arsiparis.